



26 OCT 2020

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jalan Perhubungan Raya No. 118, Kelurahan Hengjara Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. (0412) 210000 Fax: (0412) 224150 Kode Pos: 92612 Kabupaten Sinjai

ASLI

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI**
NOMOR : 1301/22/08/DPM-PTSP/X/2020

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
"PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PADAIDI"
DESA KALOBBA KECAMATAN TELLULIMPOE

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara satuan pendidikan nonformal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal "Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) PKBM PADAIDI" Desa Kalobba, Kecamatan Tellulimpoe;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

ASLI

TIM

8. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pendidikan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berta Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berta Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2638);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1968);
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Singaj Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Singaj Nomor 74);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Singaj (Lembaran Daerah Kabupaten Singaj Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Singaj Nomor 83);
18. Peraturan Bupati Singaj Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berta Daerah Kabupaten Singaj Tahun 2018 Nomor 23);
19. Peraturan Bupati Singaj Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kemudahan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Perikanan Mural dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Singaj (Berta Daerah Kabupaten Singaj Tahun 2019 Nomor 10);
20. Rekomendasi Perangung Jawab Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) PKBM PADADI Nomor : 002/PKBM-PY/VI/2020, Tanggal 18 Agustus 2020 Perhal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan;
21. Akta Notaris Nomor : 119 Tanggal 23 September 2018 tentang Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Padadi Disingkat PKBM PADADI;
22. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Singaj Nomor : TT/45/DP, Tanggal 22 Oktober 2020, Perhal Penerbitan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Padadi;

Memperhatikan

ASLI

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu

- : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :
Nama lembaga : PKBM PADAIDI
Alamat Lembaga : Dusun Attrongnge, Desa Kakotoba,
Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
Penanggung Jawab : TAUFIQ, SS

Kedua

- : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, berlaku sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan 18 Agustus 2023;

Ketiga

- : Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Keempat

- : Keputusan Kepala Dinas ini dipergunakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ditertbitkan di Kabupaten Sinjai
Pada tanggal : 26 Oktober 2020

a.n. **BUPATI SINJAI**
KEPALA DINAS,



LUKMAN DAHLAN, S.P., M.Si
Pangkat : Pembina Tk I / IVb
NIP : 197011301990031002

Tembusan :

1. Bupati Sinjai;
2. Kadis. Pendidikan Kabupaten Sinjai;
3. Camat Tellulimpoe;
4. Arsip.